

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banjarmasin yang dimulai awal 2025 masih bersifat terpusat di bawah Badan Gizi Nasional dengan pendanaan APBN, sementara Dinas Pendidikan hanya berperan administratif, Dinas Koperasi belum dilibatkan, dan potensi kolaborasi antardinas belum dimaksimalkan.
2. Program MBG berpotensi melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia makanan, yang dinilai strategis oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi untuk mendukung gizi siswa sekaligus mendorong ekonomi daerah, serta membuka peluang pengembangan UMKM melalui peningkatan pendapatan, pelanggan, kualitas produk, dan SDM.
3. Program MBG menghadapi kendala dari sisi pemerintah, seperti, kendala anggaran ketidakjelasan regulasi, anggaran, kendala sosial/persepsi publik, logistik, keterbatasan dana per porsi dan, serta dari sisi UMKM, seperti masalah modal, fluktuasi harga, keterbatasan SDM, kapasitas produksi, dan akses pasar terutama bagi yang jauh dari sekolah.
4. Solusi terhadap kendala program MBG mencakup pembentukan struktur organisasi yang jelas, regulasi yang memadai, kepastian anggaran, penargetan siswa kurang mampu, dan pelimpahan kewenangan ke sekolah,

sementara untuk UMKM diperlukan stabilisasi harga, pelatihan SDM, akses modal yang lebih mudah, serta pengawasan kualitas produk demi menjamin standar gizi dan kebersihan.

B. Saran

Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan pemahaman dan sebagai sarana dalam menjembatani penelitian yang berhubungan dengan program Makan Bergizi Gratis. Ada beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut.

1. Pelaku UMKM

Penulis mengharapkan agar UMKM mampu meningkatkan usahanya agar dapat terlibat dalam program MBG. UMKM sebaiknya meningkatkan kapasitas produksi dan jaminan kualitas makanan. Selain itu, UMKM diharapkan mampu menjalin hubungan kerja sama yang aktif dengan instansi dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam program MBG agar dapat menerima pelatihan dan pengawasan jika terlibat dalam program MBG.

2. Pemerintah dan Instansi Pemerintah

Pemerintah diharapkan melibatkan usaha lokal seperti UMKM dalam program MBG. Melihat potensi pengembangan dari program tersebut diharapkan UMKM diberikan kesempatan terlibat agar mampu berkembang dan dapat memberikan timbal balik terhadap negara. Selain itu, instansi pemerintah yang mengelola usaha lokal diharapkan berperan aktif

melakukan pengawasan dan pelatihan bagi vendor yang menyuplai makanan. Dengan pelatihan tersebut diharapkan vendor dapat menyesuaikan standar gizi dan menyediakan MBG yang berkualitas. Dengan pengawasan diharapkan agar MBG terdistribusi dengan baik kepada penerima program.

Dari segi program, pemerintah diharapkan dapat mengkaji kembali program tersebut seperti dampaknya bagi perekonomian negara. Permasalahan dan kendala program ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan agar tidak berdampak terhadap ekonomi nasional. Selain itu, instansi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja sama dalam mengelola program ini agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapakan akademisi mengkaji program ini agar dapat terlibat aktif mengkritisi program MBG. Evaluasi terhadap dampak program ini bagi ekonomi nasional diharapkan dapat dikaji kembali agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan permasalahan tersebut tidak berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal ini menjadikan evaluasi secara kritis tersebut sebagai sarana dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjembatani peneliti selanjutnya dalam meneliti program MBG. Sebagaimana temuan penelitian ini yang menggambarkan adanya dampak program MBG dalam mempromosikan produk suplier makanan. Hasil ini

menjadikan adanya peluang munculnya penelitian baru dalam menyikapi hasil temuan penulis tersebut.